

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi tidak hanya mempengaruhi kehidupan masyarakat saja, akan tetapi dari segi ekonomi juga akan terlihat beberapa perubahan. Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin meningkatnya jumlah penduduk (manusia) hal ini juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri akan tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian suatu negara seperti inflasi, pengangguran, lapangan pekerjaan, hasil produksi, dan sebagainya.

Tujuan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga bagaimana pembangunan itu bisa merata dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi juga harus membawa peningkatan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Pembangunan juga bukan hanya peningkatan kapasitas produksi di industri dalam negeri, namun bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia.

Pemerataan pembangunan juga dirasakan sangat penting, agar seluruh wilayah Indonesia baik itu pedesaan atau perkotaan bisa mendapatkan pembangunan yang adil dan merata, antara lain diwujudkan dalam bentuk pembangunan irigasi, sanitasi dan air minum, serta transportasi.¹ Untuk

¹ Freddy H.Tulung, *Buku Infografis Edisi III*, hlm.,18.

mewujudkan pemerataan pembangunan juga diperlukan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan yang vital dalam pemenuhan hak dasar rakyat. Infrastruktur adalah katalis pembangunan, yakni hal yang dapat mempercepat terjadinya pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat memberikan pengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga meningkatkan akses produktivitas sumber daya yang pada hakikatnya mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terkait dengan proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region.

Seperti halnya untuk menghubungkan antara pulau Madura dan pulau Jawa kemudian dibangunlah jembatan Suramadu yang peresmian tiang pancang pertama di sisi Madura (Labang-Bangkalan) oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 juni 2009 dengan panjang 5.348 meter dan lebar 31 meter yang membentang di titik Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Surabaya dengan Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Pembangunan jembatan Suramadu ini bertujuan untuk mengembangkan wilayah Madura dalam skala produksi yang berorientasi ke *clean Industry* (industri yang ramah lingkungan). Pandangan itu lebih disandarkan pada kondisi secara umum dimana pulau madura yang tidak begitu luas sedangkan jumlah penduduknya cukup padat.²

²Aliman Harish, dkk, *RA FUAD dan Civil Sociery, Cet.I*, (Lembaga Kajian Sosial Demokrasi, 2004), hlm. 147

Pembangunan Jembatan Tol Suramadu diharapkan akan mendorong percepatan pengembangan sosial ekonomi dan tata ruang wilayah-wilayah tertinggal yang ada di Pulau Madura. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut diatas, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). Yang secara struktural terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Peraturan perundang-undangan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk lebih mendukung peningkatan kinerja BPWS didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana termaksud didalam peraturan perundangan tersebut diatas.³

Badan Pelaksana BPWS (Bapel BPWS), sesuai dengan amanah Perpres 27 Tahun 2008 diatas, memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu. Kegiatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan Bapel BPWS dilaksanakan di 3 (tiga) kawasan, yaitu Kawasan Kaki Jembatan Sisi Surabaya (KKJSS) (600 Ha), Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (600 Ha) (KKJSM) dan kawasan khusus di Utara Pulau Madura (600 Ha). Kawasan Kaki Jembatan Sisi Surabaya (KKJSS) dan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) dikembangkan untuk mendorong perkembangan ekonomi, sedangkan kawasan khusus di utara Pulau Madura untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Peti Kemas.⁴

³www. BPWS. go.id diakses pada tanggal 22 Maret 2016.

⁴www.BPWS.go.id...diakses pada tanggal 22 Maret 2016.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Bapel BPWS juga bertugas untuk stimulasi pembangunan infrastruktur untuk wilayah Suramdu secara keseluruhan. Dalam hal ini Bapel BPWS melakukan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastuktur yang dilaksanakan kementrian/LPNK lain, pemerintah daerah, mauapun swasta di wilayah Madura.

Untuk mendorong perkembangan ekonomi di Madura, yang dimana masyarakat madura dominan muslim, tidak menutup kemungkinan perkembangan Ekonomi Madura berbasis Syariah sangat berpotensi. Mengingat pertumbuhan ekonomi yang berbasis Syariah semakin berkembang. Berbagai jenis bisnis yang menggunakan prinsip-prinsip syariah pun mulai bermunculan. Hal tersebut menjadi peluang bagi BPWS untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis Syariah.

Untuk itu pada hari Jum'at (11 Desember 2015) bertempat di Surabaya Plaza Hotel diselenggarakan rapat koordinasi dalam rangka pengembangan wisata di wilayah Madura. Rapat tersebut dibuka langsung oleh Deputy Perencanaan Bapel-BPWS Dr. Ir. Agus Wahyudi, S.E,MM dengan narasumber dari Kementerian Pariwisata diantaranya dari Asisten Deputy Pengembangan Destinasi Wisata Budaya, Asisten Deputy Pengembangan Wisata Alam dan Buatan, Asisten Deputy Industri Pariwisata, dan staf khusus bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata. Sedangkan peserta dalam rapat tersebut diantaranya dari unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata Propinsi Jawa-Timur,

Bappeda dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten di wilayah Madura, Setwanrah serta para Kepala Divisi di lingkungan Bapel-BPWS.

Lebih lanjut Kementerian Pariwisata ingin mendorong Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten di wilayah Madura untuk mengembangkan model destinasi-destinasi dan daya tarik wisata “*syariah/halal tourism*” seperti pengembangan destinasi desa-desa wisata syariah melalui pondok-pondok pesantren, serta mendorong pemerintah daerah bersama dengan tokoh-tokoh agama menyusun Rancangan Peraturan Daerah mengenai kegiatan usaha pariwisata seperti hotel syariah, rumah makan syariah, biro perjalanan wisata syariah dan spa syariah. Sehingga kedepannya Madura bisa menjadi “*The Island Of Halal Tourism Destination*”. pengembangan Ekonomi tersebut hendaknya tak meninggalkan ciri khas masyarakat Madura, yang sebagian besar Muslim. Kehidupan masyarakat Madura, tidak bisa lepas dari pemimpin informal seperti ulama. Ulama menjadi panutan di samping umara atau pemerintah.⁵ Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul “***Strategi BPWS dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Syari’ah di Bangkalan***”.

⁵Ibid ..,hlm., 11.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yang akan menjadi batasan penulisan penelitian ini yaitu Bagaimana Strategi BPWS dalam Mengembangkan Ekonomi Berbasis Syariah Di Bangkalan?

1.3. Tujuan

Dengan memperhatikan rumusan masalah maka pembahasan skripsi ini bertujuan Untuk mengetahui strategi BPWS dalam mengembangkan ekonomi berbasis Syari'ah di Bangkalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu :

1.4.1 Secara Teoritis.

Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Secara Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi ekonomi Islam. Secara Praktis.
2. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna.
3. Dapat memberikan informasi tambahan serta dapat menjadi acuan bagi pihak BPWS.

1.4. Kajian Pustaka

skripsi dengan judul : Pertama Skripsi dengan Judul “ *Manajemen Krisis Publik Relations(Studi Kasus Tentang Peran Pubik Relations Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Dalam Menghadapi Resistensi Masyarakat Madura di Kabupaten Bangkalan terhadap kehadiran Lembagaanya)*” oleh Yuliastiana Roos Pada Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran Publik relations dalam menghadapi resistensi masyarakat madura di Kabupaten Bangkalan terhadap BPWS lebih berperan sebagai fasilitator komunikasi. Model pendekatan yang diterapkan adalah model publik relations pengaruh personal (*personal influence model*) yang dikategorikan kedalam model publik relations asimetris dua arah. Tahapan-tahapan manajemen krisis untuk mengatasi kasus ini, terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahapan pra-krisis, merespon krisis, dan pasca krisis.⁶

Dari pemaparan penelitian di atas belum ada yang membahas secara khusus mengenai “*Strategi BPWS Dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Syari’ah di Bangkalan*”.sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

⁶Yuliastina Roos, “*Manajemen Krisis Publik Relations (Studi Kasus Tentang Peran Pubik Relations Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Dalam Menghadapi Resistensi Masyarakat Madura di Kabupaten Bangkalan terhadap kehadiran Lembagaanya)*, (Skripsi, Universitas Airlangga, 2013).

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang pada garis besarnya sebagai berikut:

- BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian sistematika Pembahasan.
- BAB II : Berisi tentang landasan teori yang terdiri dari Karakteristik Madura dan Potensinya, gambaran umum kabupaten Bangkalan, potensi di Bangkalan, kebijakan pemerintah dalam pengembangan Ekonomi Islam.
- BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi peneliian, jenis penelitian, data dan sumber data, teknik penulisan data dan analisis data.
- BAB IV : Membahas tentang gambaran umum BPWS, sejarah, Visi dan Misi BPWS, Strategi dan langkah-lagkah BPWS, Pihak-pihak yang terlibat, serta analisisnya.
- BAB V : Berisi tentang kesimpulan dan saran